

Reformasi Paradigma Pendidikan Menuju Sistem yang Merata dan Bermutu di Indonesia

Ahmad Firdaus

STAI Al-Masthuriyah, Sukabumi, Indonesia

Email: ahmadfirdaus@staialmasthuriyah.ac.id

Muhammad Taopik Kurrohman

STAI Al-Masthuriyah, Sukabumi, Indonesia

Email: mtaopikkurrohman@gmail.com

Correspondence E-mail (ahmadfirdaus@staialmasthuriyah.ac.id)

Received: 2024-03-13; Accepted: 2024-05-16; Published: 2024-06-20

Abstract

This study aims to examine the urgency of educational paradigm reform in establishing an equitable and high-quality education system in Indonesia. Employing a qualitative library research method, the study analyses various academic sources and national education policies. The findings indicate that the traditional teacher-centred and formalistic paradigm is no longer relevant in responding to global educational challenges. The new paradigm must emphasise competency-based learning, constructivist approaches, inclusive education, and technology integration. Moreover, redistributing educational resources and strengthening teacher capacity are essential to addressing disparities in access and quality across regions. In conclusion, equitable and high-quality education can only be achieved through systemic transformation in policy, curriculum, pedagogy, and stakeholder collaboration. This study contributes conceptually to the development of socially just and sustainable educational policy.

Keywords: educational paradigm, education reform, equity in quality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformasi paradigma pendidikan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang merata dan bermutu di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai sumber akademik dan kebijakan pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma pendidikan lama yang berpusat pada guru dan berorientasi pada formalitas tidak lagi relevan dalam menghadapi tantangan global. Reformasi paradigma pendidikan yang baru harus menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, pendekatan konstruktivistik, pendidikan inklusif, serta integrasi teknologi. Selain itu, dibutuhkan redistribusi sumber daya

DOI: <https://doi.org/10.30999/shibyan.v2i2.3822>

<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JURSHIBYAN/index>

pendidikan dan penguatan kapasitas guru untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas antarwilayah. Kesimpulannya, pendidikan yang merata dan bermutu hanya dapat terwujud melalui transformasi menyeluruh pada kebijakan, kurikulum, proses pembelajaran, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan pendidikan berkelanjutan yang berkeadilan sosial.

Kata kunci: paradigma pendidikan, reformasi pendidikan, pemerataan mutu

Pendahuluan

Dalam konteks pembaruan sistem pendidikan nasional, muncul kebutuhan yang mendesak untuk mengadopsi paradigma baru dalam kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Pattiasina et al. (2022) yang menegaskan pentingnya perubahan paradigma sebagai fondasi untuk memperkuat kualitas sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan bangsa yang terus berubah dan menuntut reformasi yang berkelanjutan (Syakhrani, 2019; Tilaar, 1998; Yusuf, 2012). Oleh karena itu, pendidikan perlu senantiasa diarahkan pada pembangunan manusia yang unggul serta responsif terhadap tantangan zaman, tanpa kehilangan akar nilai-nilai kebangsaan.

Pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan prasyarat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka ini, upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda strategik negara. Namun, untuk memastikan arah kemajuan yang terukur, diperlukan indikator-indikator yang jelas dalam menilai kualitas pendidikan secara menyeluruh. Menurut Rahmat (2018), penguatan tradisi kemajuan dalam dunia pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial; seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional dalam seluruh aspeknya.

Pertama-tama, pendidikan yang merata menjamin setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografi, memperoleh akses yang setara terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menjadi dasar untuk mengurangi ketimpangan sosial yang selama ini masih menjadi persoalan struktural di Indonesia (Setiawan & Apsari, 2019). Ketersediaan pendidikan yang setara tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas nasional.

Kedua, mutu pendidikan berkorelasi langsung dengan pencapaian kompetensi individu. Pendidikan yang bermutu memberikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi diri secara maksimal (Soedarwo et al., 2017). Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu serta kontribusi positifnya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Ketiga, pendidikan yang merata dan bermutu juga memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Asnawi et al. (2021) menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas memungkinkan individu memperoleh keterampilan kerja yang relevan, meningkatkan kesempatan kerja, serta mendongkrak pendapatan mereka. Secara makro, hal ini membantu menekan angka kemiskinan serta mempersempit jurang ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat (Ulfah & Anwar, 2024).

Selanjutnya, dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan yang bermutu menjadi modal utama untuk meningkatkan daya saing bangsa. Negara yang memiliki sistem pendidikan unggul cenderung lebih mampu mencetak sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global (Amirudin, 2019). Dalam konteks ini, integrasi keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi teknologi dalam kurikulum menjadi hal yang tidak terelakkan (Anwar & Umam, 2020).

Pendidikan juga berfungsi sebagai fondasi utama pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga nilai-nilai sosial yang dibutuhkan untuk partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat (Laksono & Rohmah, 2019). Pendidikan memainkan peran dalam membangun etika sosial, memperkuat kohesi sosial, serta memperkaya nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan dalam masyarakat.

Tidak kalah penting, pendidikan yang merata dan bermutu turut berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis. Zulfikar dan Dewi (2021) menyatakan bahwa melalui pendidikan, individu akan lebih memahami hak asasi manusia, menghargai keberagaman, serta memiliki kompetensi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Oleh karena itu, pendidikan menjadi instrumen utama dalam menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan yang inklusif dan partisipatif.

Sejalan dengan tantangan-tantangan tersebut, muncul wacana reformasi paradigma pendidikan menuju sistem yang lebih transformatif. Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek administratif dan kebijakan, tetapi juga

mencakup pendekatan pedagogis dan konten kurikulum. Dalam hal ini, integrasi nilai-nilai religius, ekopedagogi, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21 menjadi relevan untuk menjawab tantangan zaman (Anwar et al., 2025; Sulastri et al., 2024).

Selanjutnya, strategi kepemimpinan dalam pendidikan juga perlu diarahkan pada penguatan karakter dan nilai-nilai kebajikan sebagai fondasi dalam membentuk iklim sekolah yang positif dan mendukung proses belajar-mengajar (Suherman et al., 2025). Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan budaya kolaboratif, serta penanaman nilai keberlanjutan dalam kehidupan.

Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi paradigma pendidikan juga mencakup integrasi nilai-nilai ketauhidan dan kesadaran ekologis dalam kurikulum madrasah. Hal ini penting untuk memperkuat karakter siswa agar tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar (Anwar et al., 2025). Oleh sebab itu, reformasi paradigma pendidikan menuju sistem yang merata dan bermutu harus menjadi agenda kolektif yang melibatkan negara, institusi pendidikan, masyarakat, dan peserta didik secara aktif. Proses ini memerlukan komitmen jangka panjang serta landasan filosofis yang kuat dalam membangun peradaban bangsa melalui pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk mengeksplorasi dan menganalisis paradigma pendidikan menuju sistem yang merata dan bermutu di Indonesia. Kajian pustaka dipilih karena memberikan ruang untuk melakukan penelaahan secara sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, serta dokumen resmi lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif dan memperkaya landasan teoritik dari topik yang dikaji.

Sumber-sumber yang dianalisis dalam penelitian ini dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterkinian (terbitan dalam 10 tahun terakhir), relevansi terhadap tema pendidikan nasional, serta kontribusinya terhadap diskursus reformasi pendidikan. Selain itu, sumber klasik yang dianggap fundamental, seperti karya Tilaar (1998), juga disertakan untuk memberikan perspektif historis dan filosofis.

Analisis data dilakukan melalui teknik sintesis tematik, yaitu mengelompokkan temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam tema-tema utama seperti pemerataan pendidikan, kualitas pembelajaran, penguatan nilai-nilai karakter, serta keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan nasional. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur yang ada, serta merumuskan implikasi teoritik dan praktikal yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan penggunaan referensi yang telah terindeks secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

1. Menuju Paradigma Pendidikan Baru

Transformasi sistem pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih demokratis, relevan, dan adaptif terhadap tantangan zaman merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Dalam era disrupsi dan globalisasi, sistem pendidikan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang terampil, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, perubahan paradigma pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan keperluan mendesak yang harus segera diimplementasikan dalam praktik pendidikan nasional (Pattiasina, Aswita, Fuadi, Noviyanti, & Pratiwi, 2022).

Paradigma pendidikan lama yang cenderung menekankan pada penghafalan, penguasaan materi secara pasif, dan fokus pada hasil ujian perlu digantikan oleh paradigma baru yang lebih menekankan pada pembelajaran yang bermakna, dialogis, dan berbasis pada kehidupan nyata. Paradigma baru ini menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, dan bukan sebagai objek semata. Pembelajaran bergeser dari pendekatan behaviouristik menjadi pendekatan konstruktivistik, di mana siswa diajak untuk membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi sosial dan kultural (Ahmadi, 1992).

Dalam paradigma baru ini, praktik pembelajaran perlu dirancang untuk menstimulasi perkembangan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik secara menyeluruh. Model pembelajaran tidak lagi linier, melainkan integratif dan kontekstual, memperhitungkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis siswa. Hal ini selaras dengan pandangan UNESCO (1996) yang merumuskan empat pilar pendidikan, yaitu: *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Keempat pilar ini

menegaskan bahwa pendidikan harus tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik secara seimbang.

Salah satu perwujudan dari paradigma baru pendidikan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar pendidikan nasional yang mencerminkan perubahan paradigma pendidikan, antara lain: penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai keagamaan, bersifat sistemik dan terbuka, serta berorientasi pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan dituntut untuk mengembangkan budaya literasi dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian mutu pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003).

Perubahan paradigma ini memiliki implikasi mendalam terhadap tiga komponen utama dalam sistem pendidikan, yaitu konten, proses, dan manajemen pendidikan. Dari sisi konten, materi pembelajaran harus direvisi agar lebih kontekstual, interdisipliner, dan mengembangkan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas (Anwar & Umam, 2020). Sementara itu, proses pembelajaran harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam membangun makna dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Sedangkan dari sisi manajemen, paradigma baru menuntut sistem pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan.

Paradigma baru pendidikan juga menuntut redefinisi terhadap peran guru. Guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator, mediator, dan inspirator yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas guru menjadi keharusan mutlak. Pelatihan berkelanjutan, pengembangan profesional, serta dukungan dalam hal teknologi dan pedagogi menjadi bagian integral dalam pembangunan sistem pendidikan yang berkelanjutan (Amirudin, 2019).

Perlu digarisbawahi bahwa perubahan paradigma bukan hanya menyangkut aspek teknis pembelajaran, tetapi juga mencakup dimensi filosofis dan ideologis. Paradigma pendidikan merupakan kerangka berpikir dominan yang membentuk arah dan isi pendidikan pada suatu masa. Dalam sejarahnya, terdapat berbagai paradigma pendidikan seperti paradigma tradisional, paradigma modern berbasis standar, dan paradigma kontemporer berbasis teknologi. Setiap paradigma membawa konsekuensi terhadap cara pendidikan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Maka,

dalam memilih dan membentuk paradigma pendidikan baru, penting untuk mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional serta tantangan dan peluang di era global (Tilaar, 1998; Yusuf, 2012).

Paradigma baru juga tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memanusiakan manusia. Dalam hal ini, pendidikan harus mampu mengembangkan potensi manusia secara holistik. Ahmadi (1992) menekankan bahwa manusia memiliki tiga karakteristik utama yang membedakannya dari makhluk lain, yaitu: kesadaran diri, kehendak bebas, dan kemampuan berpikir. Ketiga sifat ini harus menjadi landasan dalam merancang sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang utuh dan berintegritas.

Implementasi paradigma baru pendidikan juga memerlukan dukungan kebijakan publik yang kuat. Reformasi kebijakan pendidikan harus didasarkan pada data empiris dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem yang ada. Selain itu, reformasi ini perlu bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan perubahan sistemik dalam pendidikan (Rahmat, 2018; Syakhrani, 2019).

Dalam praktiknya, penguatan paradigma baru dapat dilakukan melalui pendekatan kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal dan global. Kurikulum Merdeka yang saat ini sedang diimplementasikan merupakan salah satu bentuk upaya konkret dalam mewujudkan paradigma baru pendidikan. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, memperkuat profil pelajar Pancasila, serta mendorong eksplorasi potensi melalui proyek penguatan karakter.

Paradigma baru pendidikan juga mengintegrasikan penggunaan teknologi sebagai bagian dari proses belajar. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal, adaptif, dan menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit diakses. Namun demikian, digitalisasi pendidikan harus diiringi dengan kebijakan inklusif agar tidak menciptakan kesenjangan baru antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak (Setiawan & Apsari, 2019).

Arah pendidikan Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh sejauh mana paradigma baru ini dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh seluruh pelaku pendidikan. Paradigma ini harus mampu menjawab

tantangan era global, memfasilitasi perkembangan potensi siswa secara holistik, serta memperkuat jati diri bangsa melalui pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Pendidikan bukan lagi sekadar proses administratif atau formal, melainkan proses transformatif yang membentuk generasi unggul, adaptif, dan berdaya saing di tingkat global.

2. Menuju Pendidikan Merata dan Bermutu

Pendidikan yang merata dan bermutu merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Pendidikan yang hanya bertumpu pada perluasan akses tanpa diiringi peningkatan kualitas hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, reformasi pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua aspek utama: pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Rahmat, 2018).

Berdasarkan kajian Afiat (2019), meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam hal kuantitas peserta didik dan lembaga pendidikan, namun tantangan terbesar masih terletak pada aspek pemerataan mutu pendidikan. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara kelompok sosial ekonomi atas dan bawah, masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat realisasi pendidikan yang adil dan inklusif. Ketimpangan ini terlihat dalam ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas pendidikan, akses terhadap teknologi, serta pelatihan dan dukungan terhadap guru.

Faktor ketidakmerataan kualitas pendidikan sangat kompleks dan saling terkait. Pertama, distribusi guru yang tidak merata membuat sebagian daerah kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Guru-guru terbaik cenderung memilih wilayah dengan infrastruktur lebih baik, meninggalkan daerah-daerah tertinggal dalam kondisi kekurangan. Kedua, keterbatasan fasilitas fisik dan sumber belajar di sekolah-sekolah terpencil berdampak pada rendahnya kualitas proses belajar-mengajar. Ketiga, kurikulum nasional yang bersifat seragam kerap kali tidak kontekstual dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga kurang relevan dengan realitas sosial peserta didik di berbagai daerah (Setiawan & Apsari, 2019).

Dalam menjawab tantangan tersebut, reformasi paradigma pendidikan sangat diperlukan. Paradigma lama yang bersifat sentralistik dan top-down harus digantikan dengan paradigma baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal. Reformasi ini tidak hanya menyentuh

struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut perubahan mendalam dalam pemahaman, nilai, dan pendekatan pendidikan.

Salah satu prinsip utama dari paradigma baru adalah menjamin akses pendidikan yang adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang mendorong partisipasi kelompok marginal, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dengan disabilitas, serta mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan yang berkeadilan bukan berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang, tetapi memberikan apa yang dibutuhkan oleh setiap individu agar dapat mencapai potensi terbaiknya (Soedarwo, Zuriah, Yuliati, & Suwignyo, 2017).

Upaya pemerataan kualitas pendidikan juga memerlukan perubahan pendekatan dalam proses pembelajaran. Paradigma baru menekankan pergeseran dari pendekatan berpusat pada guru (*teacher-centred*) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centred*). Dalam model ini, siswa tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata. Pendekatan ini telah terbukti mampu meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pencapaian belajar siswa secara signifikan (Anwar & Umam, 2020).

Di samping itu, peningkatan mutu pendidikan memerlukan kurikulum yang relevan dan kontekstual. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan kompetensi abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, komunikasi efektif, serta kolaborasi. Kurikulum yang terlalu teoritis dan jauh dari konteks kehidupan sehari-hari membuat siswa kesulitan mengaplikasikan pengetahuannya secara praktikal. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan pendekatan kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal agar lebih relevan dengan lingkungan tempat siswa belajar dan hidup (Laksono & Rohmah, 2019).

Pendidikan berbasis kompetensi juga menjadi bagian integral dari paradigma baru. Dalam pendekatan ini, penilaian tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan sikap, keterampilan, dan nilai. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kehidupan masyarakat. Pendidikan berbasis kompetensi berorientasi pada hasil belajar yang jelas dan terukur, mendorong integrasi antara teori dan praktik (Amirudin, 2019).

Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga merupakan prasyarat penting dalam menciptakan pendidikan yang merata dan bermutu.

Sekolah-sekolah di wilayah tertinggal masih mengalami kesulitan dalam hal akses internet, fasilitas laboratorium, dan perpustakaan. Pemerataan sumber daya pendidikan harus menjadi prioritas kebijakan nasional. Pemerintah perlu menyediakan pendanaan afirmatif yang berpihak pada daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan (Asnawi, Kindangen, & Engka, 2021).

Selain itu, kualitas guru perlu menjadi perhatian utama dalam reformasi paradigma pendidikan. Guru merupakan aktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermutu. Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan profesional, dan peningkatan kesejahteraan. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik akan mampu menciptakan pembelajaran yang inspiratif dan transformatif (Afiat, 2019).

Penggunaan teknologi juga menjadi strategi penting dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Teknologi dapat menjembatani keterbatasan akses terhadap sumber belajar dan pelatihan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun demikian, pemanfaatan teknologi pendidikan harus diiringi dengan literasi digital yang memadai, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Kesenjangan digital (digital divide) harus diatasi melalui kebijakan yang menjamin akses internet yang merata serta distribusi perangkat yang adil (Syakhrani, 2019).

Lebih dari itu, pendidikan yang merata dan bermutu tidak dapat dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat. Komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan orang tua memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas akan memperkuat proses pembelajaran yang kontekstual, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendidikan harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya beban pemerintah (Soedarwo et al., 2017).

Akhirnya, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan dan mutu harus didesain secara sistemik dan berkelanjutan. Kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi guru, pembaruan kurikulum, serta penguatan akuntabilitas dan evaluasi harus berjalan secara terpadu. Pendidikan yang merata dan bermutu merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, dan tidak dapat dicapai melalui pendekatan sektoral semata.

Dengan demikian, reformasi paradigma pendidikan menuju sistem yang merata dan bermutu merupakan suatu keniscayaan dalam menjawab

tantangan abad ke-21. Pendidikan yang adil dan berkualitas tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup individu, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa secara keseluruhan. Hal ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat vital bagi masa depan Indonesia.

3. Reformasi Paradigma Pendidikan Menuju Sistem yang Merata dan Bermutu

Reformasi pendidikan tidak semata-mata menyangkut perubahan kurikulum atau perombakan struktur kelembagaan pendidikan, tetapi lebih dalam dari itu, mencakup perubahan paradigma yang menyeluruh. Paradigma pendidikan menentukan bagaimana pendidikan dirancang, dijalankan, dan dinilai dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, menuju pendidikan yang merata dan bermutu di Indonesia memerlukan transformasi paradigma pendidikan secara sistemik, filosofis, dan operasional.

Paradigma lama pendidikan nasional banyak dipengaruhi oleh pendekatan transmisi, di mana guru menjadi pusat penyampaian ilmu dan siswa diposisikan sebagai penerima pasif. Pendekatan ini bersifat seragam dan menekankan pada penguasaan materi secara kognitif. Akibatnya, pendidikan kurang mampu menanggapi keberagaman kebutuhan peserta didik dan gagal menciptakan pembelajaran yang kontekstual serta bermakna (Tilaar, 1998). Reformasi paradigma pendidikan diperlukan agar sistem pendidikan mampu merespons dinamika zaman, menyesuaikan diri dengan kompleksitas masyarakat, serta berorientasi pada pemberdayaan peserta didik secara holistik.

Reformasi paradigma pendidikan harus bermula dari pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan instrumen transformatif untuk menciptakan manusia yang berkarakter, berpikir kritis, dan mampu hidup secara bermakna dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, Ahmadi (1992) menyatakan bahwa manusia memiliki tiga sifat dasar yang menjadi landasan pendidikan, yaitu kesadaran diri, kehendak bebas, dan kapasitas berpikir. Ketiga dimensi ini menjadi pilar dalam merancang pendekatan pendidikan yang menempatkan manusia sebagai makhluk merdeka, kreatif, dan bertanggungjawab.

Salah satu prinsip utama reformasi paradigma pendidikan ialah memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara. Pendidikan harus bersifat inklusif dan nondiskriminatif, menyediakan ruang bagi kelompok yang selama ini termarginalkan, seperti anak-anak dari

keluarga miskin, anak-anak dengan disabilitas, serta kelompok minoritas di daerah terpencil. Setiawan dan Apsari (2019) menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah bentuk konkret dari keadilan sosial dalam pendidikan, yang bertujuan menjamin bahwa semua individu memperoleh kesempatan untuk belajar secara optimal.

Namun, akses semata tidak cukup. Reformasi paradigma juga harus menekankan peningkatan kualitas pembelajaran. Pendekatan berpusat pada siswa (*student-centred learning*) menjadi arah baru dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa aktif membangun pengetahuannya melalui diskusi, kolaborasi, eksperimen, dan pemecahan masalah kontekstual. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang menciptakan ruang belajar kondusif dan mendorong keterlibatan aktif siswa (Anwar & Umam, 2020). Pembelajaran juga harus bersifat reflektif, mengembangkan kesadaran sosial, dan membangun nalar kritis siswa terhadap lingkungan sosial dan budayanya.

Reformasi juga menyentuh ranah pengembangan kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan lokal dan global, serta menekankan pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativiti, komunikasi, dan kolaborasi. Laksono dan Rohmah (2019) menyarankan agar kurikulum tidak hanya berisi materi, tetapi juga nilai-nilai kehidupan, keterampilan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan pekerja, tetapi membentuk warga negara yang bertanggungjawab, toleran, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan berbasis kompetensi (*competency-based education*) merupakan pendekatan yang diusulkan dalam paradigma baru ini. Fokus utamanya ialah pada hasil belajar yang terukur dan relevan dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Dengan orientasi ini, siswa diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual, produktif, dan inovatif dalam berbagai situasi (Amirudin, 2019). Pendidikan berbasis kompetensi juga mendukung konsep *lifelong learning*, di mana individu terus belajar dan berkembang sepanjang hayat.

Teknologi pendidikan turut memainkan peranan penting dalam mendukung reformasi paradigma. Teknologi dapat menjembatani kesenjangan akses, memperluas sumber belajar, serta memungkinkan personalisasi pembelajaran. Namun, penerapan teknologi dalam pendidikan harus disertai dengan literasi digital, pelatihan guru, serta dukungan

infrastruktur yang memadai, agar transformasi digital tidak memperlebar kesenjangan antara kelompok yang memiliki dan tidak memiliki akses teknologi (Syakhrani, 2019).

Penguatan kapasitas guru menjadi aspek kunci dalam transformasi pendidikan. Guru adalah pelaku utama dalam implementasi paradigma pendidikan baru. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus disertai dengan strategi pengembangan profesional berkelanjutan, pelatihan pedagogik modern, serta penghargaan terhadap profesi guru. Afiat (2019) menekankan bahwa guru yang kompeten dan berdaya akan mampu menciptakan iklim belajar yang mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Selanjutnya, reformasi paradigma pendidikan juga harus memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia dijalankan. Keterlibatan aktif orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam proses pendidikan akan menciptakan ekosistem belajar yang lebih holistik dan berkelanjutan (Soedarwo et al., 2017). Masyarakat perlu diposisikan bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang berperan dalam mengawal dan mendukung sistem pendidikan.

Kebijakan publik memiliki peranan strategis dalam mengarahkan reformasi pendidikan. Pemerintah harus merancang kebijakan yang mendukung pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Pendanaan pendidikan yang adil dan proporsional harus diberikan kepada daerah-daerah yang tertinggal, serta kelompok yang termarginalkan. Selain itu, sistem evaluasi pendidikan harus dirancang untuk mendukung pembelajaran, bukan sekadar mengukur hasil kognitif secara kuantitatif. Evaluasi yang bersifat formatif, holistik, dan berkelanjutan akan membantu guru dan siswa dalam memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus (Zulfikar & Dewi, 2021).

Akhirnya, reformasi paradigma pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial dan instan. Ia memerlukan visi jangka panjang, komitmen politik, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Proses ini adalah bagian dari pembangunan peradaban, yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi kebijakan. Indonesia hanya akan mampu bersaing secara global jika memiliki sistem pendidikan yang berakar kuat pada nilai-nilai nasional, tetapi juga terbuka terhadap pembaruan dan inovasi global.

Oleh karena itu, menuju pendidikan yang merata dan bermutu memerlukan transformasi menyeluruh dalam cara kita memandang pendidikan. Paradigma baru pendidikan harus berorientasi pada

humanisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan, dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendidikan yang sejati bukan hanya mempersiapkan manusia untuk bekerja, tetapi membentuk manusia yang mampu hidup secara bermakna dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Kesimpulan

Reformasi paradigma pendidikan di Indonesia merupakan langkah strategik untuk menjawab tantangan pemerataan dan peningkatan mutu secara simultan. Pergeseran dari pendekatan lama yang berorientasi pada hasil dan formalitas menuju pendekatan baru yang berbasis kompetensi, partisipatif, dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan. Reformasi ini harus disertai dengan kebijakan yang mendukung inklusivitas, penguatan kapasitas guru, pembaruan kurikulum, serta integrasi teknologi secara merata. Pendidikan yang merata dan bermutu tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa, tetapi juga mendorong pembangunan sosial yang berkeadilan. Penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis kajian pustaka, sehingga tidak menyajikan data empiris lapangan. Keterbatasan ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan yang menguji implementasi reformasi paradigma pendidikan di berbagai wilayah dengan konteks yang berbeda. Selain itu, keterlibatan langsung pemangku kepentingan pendidikan belum dibahas secara mendalam, yang dapat menjadi fokus dalam studi lanjutan..

Daftar Pustaka

- Sulastri, N., Anwar, S., Suherman, U., & Cipta, E. S. (2024). Deep Learning-Based Planning Model for Islamic Education in Indonesian Integrated Schools. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 645–658. <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i2.1734>
- Afiat, Z. (2019). Homeschooling; pendidikan alternatif di Indonesia. *Visipena*, 10(1), 50–65.
- Ahmadi, A. (1992). *Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Amirudin, M. F. (2019). Hubungan pendidikan dan daya saing bangsa. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 35–48.
- Anwar, S., & Umam, H. (2020). Transformative education: Emphasising 21st century skills and competencies in the independent learning

- curriculum. *AIM: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 1–16.
<https://doi.org/10.15575/aim.v1i1.28886>
- Asnawi, R., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Pengaruh pendidikan, program keluarga harapan dan program rumah tinggal layak huni terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(2), 109–126.
- Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial dan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 1–11.
- Pattiasina, P. J., Aswita, D., Fuadi, T. M., Noviyanti, A., & Pratiwi, E. Y. R. (2022). Paradigma baru pendidikan karakter era inovasi disrupsi dan implementasi praktisnya di era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 2446–2454.
- Rahmat, S. T. (2018). Pendidikan yang merata dan berkualitas. *Early Childhood Education Journal of Indonesia*, 1(2), 7–12.
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). Pendidikan inklusif: Upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di bidang pendidikan bagi anak dengan disabilitas (AdD). *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(3).
- Soedarwo, V. S. D., Zuriah, N., Yulianti, R., & Suwignyo, S. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal berbasis potensi lokal dalam membangun desa wisata adat. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*, 2(2), 97–103.
- Syahrani, A. W. (2019). Memperkuat eksistensi pendidikan Islam di era 4.0. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 1(2).
<https://doi.org/10.37567/siln.v1i2.90>
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21*. Bandung: IndonesiaTera.
- UNESCO. (1996). *Learning: The treasure within – Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century*. Paris: UNESCO Publishing.
- Ulfah, U., & Anwar, S. (2024). Inovasi Digital dalam Pendidikan Islam: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Keterlibatan Mahasiswa. *ULUL ALBAB: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 58–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30999/ululalbab.v2i1.3521>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yusuf, T. M. M. (2012). Anomali reformasi penyelenggaraan pembelajaran di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, 15(1), 85–91.

Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115.